

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Darmawi, H. (2000). *Manajemen Asuransi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. S. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta. Prenada Media.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Isnur, E. Y. (2008). *Tata cara mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana
- Purba, R. (2001). *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo
- Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital
- Umam, K. (2013). *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital
- Urip, S. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur. Kencana

### **Jurnal/ Hasil Penelitian**

- Anggriani, S. W. (2016). "Kualitas Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Dan Non BPJS Kesehatan". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No.2.
- Ardani, M. N. (2017). "Kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia". *Law Reform*, Vol. 13 No.2.

- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi". *Journal Pro Hukum Universitas Gresik*, Vol.9 No.2.
- Aristiawati, A.K.F., & Nugroho, M. W. (2022). "Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli". *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, Vol.3 No.1
- Badruzaman, D. (2019). "Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3 No.1.
- Elvarisha,E., Ridwan,R., & Ibrahim,Z. (2022). "Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjaannya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)". *Lex LATA*, Vol.2 No.2.
- Febriansyah, F. I. (2016). "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia". *Perspektif*, Vol. 21 No.3.
- Gumanti, R. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No.1.
- Guntara, D. (2016). "Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya". *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1.
- Hayati, N. (2016). "Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)". *Lex Journalica*, Vol. 13 No.3.
- Hidayati, T. (2022). "Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah". *Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan*, Vol.1 No.01.
- Listyowati, N. (2015). "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum". *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, Vol.1 No.2
- Malik, A. A. (2019). "Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs)". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 8 No.1.
- Manggara, F. (2013). "Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Tidak Terlaksananya Proses Peralihan Hak Atas Tanah". *Lex Administratum*, Vol. 1 No.1.

- Mariyam, S. (2018). "Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)". *Serat Acitya*, Vol. 7 No. 2.
- Oe, M. D. (2015). "Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1.
- Prawira, I. G. B. Y., & Yoga, G. B. (2016). "Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah". *Jurnal Ius*, Vol.4 No. 1
- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). "Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Rumengan, D. S., Umboh, J. M. L., & Kandou, G. D. (2015). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado". *Jurnal Jikmu*, Vol. 5 No.2.
- Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). "Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*.
- Santoso, U. (2012). "Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)". *Jurnal Perspektif*, Vol.17 No. 2.
- Tampubolon, W. S. (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.4 No.1.
- Utama, P. A. B., Sumardika, I. N., & Astiti, N. G. K. S. (2021). "Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dihadapan PPAT". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2 No.1.
- Wardana, R. A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2019). "Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt. G/2012/PT. TK)". *Jurnal Repertorium*, Vol.6 No.1.
- Widiastuti, I. (2017). "Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat". *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2.

Widowati,C. (2013). "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan". *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1.

Yikwa, I. (2015). "Aspek hukum pelaksanaan perjanjian asuransi". *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara.1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara.2011/No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 5256)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara.2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara.2014/No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara.1997 No. 59)

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara.2016/No. 29)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

### **Internet**

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pada pukul 13.45

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062> , diakses pada tanggal 24 Januari 2023, pada pukul 15.15

<http://www.damang.web.id/2012/01/hukum-akan-menjadi-benda-mati-jika.html> , diakses pada tanggal 15 April 2023, pada pukul 9.56

<http://repository.unissula.ac.id/15702/5/babI.pdf> , diakses pada tanggal 15 april 2023 pada pukul 10.59

